



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2026

BP3KP JAWA II



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 dapat diselesaikan. Dokumen Laporan Kinerja Triwulan ini disusun berdasarkan penjabaran target kinerja sebagai salah satu wujud komitmen dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi presiden khususnya dalam bidang perumahan dan Kawasan permukiman yang layak. Laporan Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memuat program dan kegiatan guna meningkatkan kualitas Dukungan Manajemen di lingkungan Kementerian PKP.

Laporan Kinerja Triwulan ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdayaguna dan berhasil guna dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya.

Melalui Dokumen Laporan Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target Unit Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2026.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan dan partisipasinya dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu mohon kiranya diberikan masukan guna penyempurnaannya.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jawa II



Mochamad Mulya Permana, S.T., M.T.

NIP. 19710920 199803 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tugas dan Fungsi.....	7
1.3 Struktur Organisasi.....	8
 BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I	 10
2.1 Target Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II	10
2.2 Metode Pengukuran Kinerja.....	14
2.3 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II	38
2.4 Permasalahan/Faktor Keberhasilan	42
 BAB III KESIMPULAN.....	 43
3.1 Rencana dan Tindak Lanjut.....	43
3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya.....	43



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Awal Balai P3KP Jawa II dan Satker PKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2026	11
Tabel 2.2	Metode Pengukuran Kinerja BP3KP Jawa II	14
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Program Triwulan I Balai P3KP Jawa II (DIPA SEKJEN)	38
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Program Triwulan I Balai P3KP Jawa II (DIPA DJKP)	39
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Program Triwulan I Balai P3KP Jawa II (DIPA Perdesaan)	39
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Program Triwulan I Balai P3KP Jawa II (DIPA Perkotaan)	40
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Program Triwulan I Balai P3KP Jawa II (DIPA TKPR)	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II	8
Gambar 2.1	Rencana Fisik DIPA Sekretariat Jenderal TA. 2026	11
Gambar 2.2	Rencana Fisik DIPA Kawasan Permukiman TA. 2026	12
Gambar 2.3	Rencana Fisik DIPA Perkotaan TA. 2026	12
Gambar 2.4	Rencana Fisik DIPA Perdesaan TA. 2026	13
Gambar 2.5	Rencana Fisik DIPA Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA. 2026	13



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, selanjutnya disebut Kementerian PKP, merupakan kementerian yang dibentuk pada tahun 2024 dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Kementerian ini memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan serta suburusan kawasan permukiman, yang secara administratif merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Pembentukan dan kedudukan Kementerian PKP secara hukum ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang ditetapkan pada tanggal 8 November 2024. Pembentukan kementerian ini bertujuan untuk mendukung Presiden dalam pelaksanaan pemerintahan negara, khususnya dalam upaya mewujudkan penyediaan hunian yang layak serta pengembangan Kawasan permukiman yang terpadu, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, Kementerian PKP berkontribusi dalam mendukung pencapaian Program Nasional (PN), khususnya PN 6: membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Salah satu program prioritas dalam mendukung PN tersebut adalah program prioritas ke-13: menjamin hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. Peran strategis Kementerian PKP dalam bidang ini diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur dasar pemukiman yang berkualitas dan berkeadilan, serta penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Peran strategis tersebut diwujudkan melalui pembangunan guna menjawab mandat pembangunan tersebut, Presiden menetapkan sasaran pembangunan dan renovasi sebanyak 3 (tiga) juta unit rumah, yang terdiri atas 1 (satu) juta rumah di kawasan perkotaan, 1 (satu) juta rumah di kawasan perdesaan, dan 1 (satu) juta



rumah di wilayah pesisir. Untuk mendukung pencapaian sasaran dimaksud secara efektif dan tepat sasaran, Kementerian PKP menetapkan strategi pelaksanaan melalui tiga peran utama, yaitu: (1) sebagai operator dalam pelaksanaan pembangunan fisik; (2) sebagai regulator dalam perumusan kebijakan serta percepatan proses perizinan; dan (3) sebagai fasilitator dalam penyediaan kemudahan akses terhadap perumahan bagi masyarakat.

Seiring dengan kompleksitas tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dibutuhkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan transparan. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kendala, antara lain minimnya minat investor untuk memberikan pendanaan di sektor perumahan, belum tersedianya NSPK yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II, keterbatasan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan program di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, keterbatasan anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, terhambatnya penyelesaian serah terima aset, serta fragmentasi data dan ketergantungan vendor dalam pengembangan sistem informasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakefisienan proses kerja, menurunnya akuntabilitas, dan menghambat tujuan strategis kementerian. Oleh karena itu, instansi pemerintah termasuk di dalamnya unit organisasi diwajibkan menyusun dan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu komponen penting dalam SAKIP adalah Perjanjian Kinerja, yang menjadi dasar penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawahnya untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Target dalam Perjanjian Kinerja tersebut kemudian dijabarkan secara lebih rinci ke dalam Rencana Aksi Kinerja, yang memuat target kinerja triwulanan sebagai turunan dari target tahunan. Rencana Aksi Kinerja ini selanjutnya menjadi dasar dalam proses pengukuran kinerja, sebagai bagian dari siklus penyelenggaraan SAKIP secara menyeluruh.

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja merupakan instrumen strategis yang berperan penting dalam memastikan setiap unit kerja berkontribusi secara terukur terhadap pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam peningkatan kualitas tata kelola dan sistem pengawasan intern. Lebih dari sekadar pemetaan capaian kinerja secara periodik, Rencana Aksi Kinerja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau



dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, dokumen ini menjadi pedoman manajerial bagi unit kerja dalam menguraikan sasaran strategis ke dalam aktivitas operasional yang terukur, selaras, dan akuntabel, sehingga mendukung penguatan tata kelola serta efektivitas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PKP mempunyai tugas Melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;



- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuaian; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit eselon I Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



Permukiman. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai dibantu oleh unsur pelaksana dan unsur pendukung, adapun tugas-tugasnya yaitu:

- a. Kepala Balai, bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP di wilayah kerjanya, serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal / Deputi terkait melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (sesuai ketentuan organisasi).
- b. Subbagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi, ketatausahaan, perlengkapan, serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan balai.
- c. Seksi Penyediaan Perumahan, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penyediaan perumahan, meliputi rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya (BSPS), perumahan umum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta pendampingan teknis pembangunan perumahan.
- d. Seksi Kawasan Permukiman, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, termasuk penanganan permukiman kumuh, dukungan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), serta koordinasi penataan kawasan permukiman dengan pemerintah daerah.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan balai, yang melaksanakan tugas secara profesional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kelompok Jabatan Pelaksana BP3KP merupakan kelompok pegawai ASN (PNS/PPPK) yang menduduki Jabatan Pelaksana pada Balai/ BP3KP dan bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP.



BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II (BP3KP Jawa II) berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja selama satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

2.1 Target Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Pada Tahun 2026 bulan Maret, sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati, BP3KP Jawa II dan Satuan Kerja PKP Provinsi Jawa Barat memiliki amanat menjalankan Program Perumahan dengan pagu anggaran masing masing Direktorat Jenderal. Pada Triwulan I ini (bulan Januari, Februari, Maret 2026), kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II yaitu berupa Sosialisasi Dan Pendampingan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Sosialisasi dan Penerapan Manajemen Risiko, menindaklanjuti laporan pada aplikasi BENAR-PKP, Klinik PKP dan SPAN Lapor, Pendampingan Penyusunan RP3KP, Pelaksanaan Rekrutmen Calon Tenaga Fasilitator Lapangan Program bantuan BSPS, Pelaksanaan pembangunan Rumah Susun hunian ASN Mahkamah Agung di Kota Bandung dan Kota Bekasi, dan Pelaksanaan OJT bagi CPNS baru sebagai berikut:



Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Awal Balai P3KP Jawa II dan Satker PKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

No	Direktorat Jenderal	BP3KP Jawa II	Satker PKP Provinsi Jawa Barat
1	Sekretariat Jenderal	Rp2.261.909.000	Rp557.018.000
2	Direktorat Jenderal Perkotaan	Rp387.133.000	Rp95.783.306.000
3	Direktorat Jenderal Perdesaan	Rp491.713.000	Rp11.287.670.000
4	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Rp273.808.000	Rp21.692.821.000
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Rp148.605.000	-

1. DIPA Sekretariat Jenderal

Target kinerja Triwulan I direncanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal beserta DIPA Sekretariat Jenderal pada tanggal 31 Maret 2026 sebesar **Rp2.261.909.000,-** dengan rencana fisik sebagai berikut:

Gambar 2.1. Rencana Fisik DIPA Setjen TA. 2026

No.	Nama Paket	Output	Metode	Pagu RAKAL (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Rencana Fisik Per Bulan		
							Jan	Feb	Mar
1	Layanan Umum BP3KP Jawa II	1 Layanan	Swakelola	45,797,000	1/2/2025	12/31/2025	0.15	25.65	27.22
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II	1 Layanan	Swakelola	419,931,000	1/2/2025	12/31/2025	0.15	7.2	9.2
3	Langganan Daya dan Jasa	1 Dokumen	Swakelola	450,000,000	1/2/2025	12/31/2025	0.15	6.21	12.54
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Dokumen	Swakelola	509,001,000	1/2/2025	12/31/2025	0.15	2.62	4.62
5	Honor Pengelola Keuangan	1 Laporan	Swakelola	661,845,000	1/2/2025	12/31/2025	0	0.15	2.87
6	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BP3KP Jawa II dan Satker Jawa Barat	1 Laporan	Swakelola	52,000,000	1/2/2025	12/31/2025	0	0	0
7	Pengadaan Perangkat Pengolah Data BP3KP Jawa II dan Satker Jawa Barat	1 Dokumen	Swakelola	123,335,000	1/2/2025	12/31/2025	0	0	0
TOTAL				2,261,909,000			0.09	3.72	6.63

2. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Target kinerja Triwulan I direncanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal beserta DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan pada



tanggal 31 Maret 2026 sebesar **Rp387.133.000,-** dengan rencana fisik sebagai berikut:

Gambar 2.2. Rencana Fisik DIPA Perkotaan TA. 2026

No.	Nama Paket	Output	Metode	Pagu RKAKL (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Rencana Fisik Per Bulan		
							Jan	Feb	Mar
1	Perencanaan dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Balai P3KP	1 Rekomendasi	Swakelola	58,919,000	1/2/2025	12/31/2025	0.5	5.39	5.39
2	Fasilitasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi	Swakelola	35,812,000	1/2/2025	12/31/2025	4	15.5	15.5
3	Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi	Swakelola	45,381,000	1/2/2025	12/31/2025	0.5	11.5	18.7
4	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi	Swakelola	53,733,000	1/2/2025	12/31/2025	2.9	2.9	5.43
5	Fasilitasi dan Pemantauan Penyaluran Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi	Swakelola	49,898,000	1/2/2025	12/31/2025	0.5	1.96	1.96
6	Pengendalian Program Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Balai P3KP	1 Laporan	Swakelola	32,459,000	1/2/2025	12/31/2025	0.5	5.41	6.51
7	Layanan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Balai P3KP	1 Layanan	Swakelola	12,523,000	1/2/2025	12/31/2025	0.5	0.5	0.5
8	Rencana Kebutuhan dan Pengelolaan BMN Perumahan Perkotaan Balai P3KP Jawa II	1 Layanan	Swakelola	14,986,000	1/2/2025	12/31/2025	0.5	18.8	18.8
9	Publikasi Data dan Informasi Publik bidang Perumahan Perkotaan di Balai P3KP	1 Layanan	Swakelola	15,412,000	1/2/2025	12/31/2025	0.5	0.5	0.5
TOTAL				319,123,000			1.30	6.641558835	8.203315869

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Target kinerja Triwulan I direncanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal beserta DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada tanggal 31 Maret 2026 sebesar **Rp491.713.000,-** dengan rencana fisik sebagai berikut:



Gambar 2.3. Rencana Fisik DIPA Perdesaan TA. 2026

No.	Nama Paket	Output	Metode	Pagu RKAKL (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Rencana Fisik Per Bulan		
							Jan	Feb	Mar
1	Penyusunan Perencanaan Teknis Perumahan Perdesaan di BP3KP Jawa II	1 Rekomendasi	Swakelola	13,239,000	1/2/2025	12/31/2025	0.5	8.79	27.6
2	Penyusunan Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan di BP3KP Jawa II	1 Rekomendasi	Swakelola	71,150,000	1/2/2025	12/31/2025	0.5	13.2	13.2
3	Penyusunan Perencanaan Kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi	Swakelola	58,749,000	1/2/2025	12/31/2025	0.5	1	1
4	Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan di BP3KP Jawa II	1 Dokumen	Swakelola	21,518,000	1/2/2025	12/31/2025	0.5	1	1
5	Fasilitasi Pengalihan Aset Pembangunan Perumahan Perdesaan BP3KP Jawa II	1 Laporan	Swakelola	11,749,000	1/2/2025	12/31/2025	0.5	1	1
6	Layanan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1 Layanan	Swakelola	28,639,000	1/2/2025	12/31/2025	0.5	1	1
7	Pengelolaan Data dan Informasi Serta Publikasi	1 Layanan	Swakelola	13,639,000	1/2/2025	12/31/2025	0.5	1	1
TOTAL				218,683,000			0.5	5.44	6.58

4. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Target kinerja Triwulan I direncanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal beserta DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada tanggal 31 Maret 2026 sebesar **Rp273.808.000,-** dengan rencana fisik sebagai berikut:

Gambar 2.4. Rencana Fisik DIPA Permukiman TA. 2026

No.	Nama Paket	Output	Metode	Pagu RKAKL (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Rencana Fisik Per Bulan		
							Jan	Feb	Mar
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II	1 Dokumen	Swakelola	23,121,000	1/2/2025	12/31/2025	1.1	3.95	3.95
2	Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II	1 Dokumen	Swakelola	58,958,000	1/2/2025	12/31/2025	5.3	25.1	27.6
3	Pelaksanaan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman Balai P3KP Jawa II	1 Rekomendasi	Swakelola	52,319,000	1/2/2025	12/31/2025	1.1	8.18	8.18
4	Layanan Umum Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada BP3KP Jawa II	1 Layanan	Swakelola	14,635,000	1/2/2025	12/31/2025	1.1	8.04	8.04
5	Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi BP3KP Jawa II	1 Layanan	Swakelola	2,617,000	1/2/2025	12/31/2025	1.1	1.1	1.1
6	Penatausahaan BMN Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman di BP3KP Jawa II	1 Layanan	Swakelola	14,624,000	1/2/2025	12/31/2025	35.6	35.6	35.6
TOTAL				166,274,000			3.41	8.19	12.97



5. DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Target kinerja Triwulan I direncanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal beserta DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada tanggal 31 Maret 2026 sebesar **Rp148.605.000,-** dengan rencana fisik sebagai berikut:

Gambar 2.5. Rencana Fisik DIPA TKPR TA. 2026

No.	Nama Paket	Output	Metode	Pagu RKA KL (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Rencana Fisik Per Bulan		
							Jan	Feb	Mar
1	Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP	1 Rekomendasi	Swakelola	20,307,000	1/2/2025	12/31/2025	1.75	26.6	28.3
2	Penerapan Manajemen Risiko Balai P3KP	1 Rekomendasi	Swakelola	48,156,000	1/2/2025	12/31/2025	2.49	2.64	2.64
3	Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Balai P3KP	1 Rekomendasi	Swakelola	16,903,000	1/2/2025	12/31/2025	2.01	2.06	2.06
4	Pemantauan dan Pendampingan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1 Laporan	Swakelola	9,318,000	1/2/2025	12/31/2025	1.75	34.1	34.1
TOTAL				94,684,000			2.17	10.77	11.14



2.2 Metode Pengukuran Kinerja

Tabel 2.2 Metode Pengukuran Kinerja BP3KP Jawa II

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan					
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Hunian Layak					
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi					
SK 1 Meningkatkan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai ...	IKSK 1 Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	OK 1 Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal



			2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan		
		OK 2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman 		



			2027: 2 laporan 2028: 2 laporan 2029: 2 laporan Total : 10 laporan			
		OK 4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2026: 1 laporan 2027: 1 laporan 2028: 1 laporan 2029: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 kegiatan 2026: - kegiatan 2027: - kegiatan 2028: - kegiatan 2029: - kegiatan Total : 1 kegiatan	Non Kumulatif	Internal



			OK 6 Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
			OK 7 Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2026: 1 dokumen 2027: 1 dokumen 2028: 1 dokumen 2029: 1 dokumen Total: 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal



			OK 8 Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan 2026: 2 laporan 2027: 2 laporan 2028: 2 laporan 2029: 2 laporan Total: 9 laporan	Non Kumulatif	Internal
			OK 9 Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal



					2029: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan			
				OK 10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2026: 2 laporan 2027: 2 laporan 2028: 2 laporan 2029: 2 laporan Total: 8 laporan	Non Kumulatif	Internal	
Kegiatan 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum								
SK 1	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai P3KP Jawa II	IKSK 1	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	OK 1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 289 unit 2026: 4.230 unit 2027: 4.230 unit 2028: 4.230 unit	Non Kumulatif	Internal



				2029: 4.230 unit Total : 17.209 unit		
IKSK 2	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal	OK 2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2026: 1.000 unit 2027: 1.000 unit 2028: 1.000 unit 2029: 1.000 unit Total: 4.000 unit	Non Kumulatif	Internal
IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU	OK 3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2026: - dokumen 2027: 1 dokumen 2028: 1 dokumen 2029: 1 dokumen Total: 3 dokumen	Non Kumulatif	Internal



OK 4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2026: 1 dokumen 2027: 1 dokumen 2028: 1 dokumen 2029: 1 dokumen Total: 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
OK 5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Jawa II. Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2026: 1 dokumen 2027: 1 dokumen 2028: 1 dokumen 2029: 1 dokumen Total: 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal



				OK 6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
		Kegiatan 3: Penyediaan Rumah Layak Huni						
SK 1	Meningkatnya ketersediaan layak huni	IKSK 1	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	OK 1	Jumlah unit rumah swadaya <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah unit rumah swadaya oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi jumlah unit rumah swadaya di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 4.847 unit 2026: 36.449 unit 2027: 36.449 unit 2028: 36.449 unit 2029: 36.449 unit Total : 150.643 unit	Non Kumulatif	Internal



	IKSK 2	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	OK 2	Jumlah rumah khusus yang terbangun <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2026: 2.650 unit 2027: 2.650 unit 2028: 2.650 unit 2029: 2.650 unit Total : 10.600 unit	Non Kumulatif	Internal
			OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah susun yang terbangun oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 44 unit 2026: 572 unit 2027: 616 unit 2028: 616 unit 2029: 616 unit Total : 2.464 unit	Non Kumulatif	Internal



		IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman	OK 4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi laporan penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2026: 1 laporan 2027: 1 laporan 2028: 1 laporan 2029: 1 laporan Total: 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan 2026: - laporan 2027: - laporan 2028: - laporan 2029: - laporan Total: 2 laporan	Non Kumulatif	Internal



			OK 6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2026: 1 laporan 2027: 1 laporan 2028: 1 laporan 2029: 1 laporan Total: 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
			OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal



			OK 8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
			OK 9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2026: 1 laporan 2027: 1 laporan 2028: 1 laporan 2029: 1 laporan Total: 4 laporan	Non Kumulatif	Internal



			OK 10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
			OK 11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Dihitung dari rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal



Kegiatan 4: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan								
SK 1	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan	IKSK 1	Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan yang terjangkau	OK 1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Dihitung dari rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM 2: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh								
Kegiatan 1: Penanganan Permukiman Kumuh								



SK 1	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	IKSK 1	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	OK 1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Capaian dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. Capaian = Realisasi penanganan kumuh oleh Balai P3KP Jawa II Target tahunan sebagai pelaksana (Ha): 2025: 22 Ha 2026: - Ha 2027: 20 Ha 2028: - Ha 2029: - Ha Total: 42 Ha	Non Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM 3: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman								
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman								
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	IKSK 1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	OK 1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko oleh Balai P3KP Jawa II mulai tahun 2026 Capaian = Realisasi laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2026: 1 laporan 2027: 1 laporan 2028: 1 laporan 2029: 1 laporan Total: 4 Laporan	Non Kumulatif	Internal



SK 2	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	IKSK 2	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	OK 1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan penerapan zona integritas di Balai P3KP Jawa II Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan pembangunan dan penerapan zona integritas di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
SK 3	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	IKSK 3	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	OK 1	Jumlah penerapan manajemen risiko	Dihitung dari realisasi jumlah penerapan Manajemen Risiko di Balai P3KP Jawa II Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan penerapan Manajemen Risiko di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal



				OK 2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyipuan	Dihitung dari realisasi jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyipuan di Balai P3KP Jawa II Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyipuan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
				PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN				
				SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman				
				SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai ...				
				Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Balai ...				
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai ...	IKSK 1	Tingkat layanan dukungan manajemen Balai ...	OK 1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan perkantoran oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan perkantoran di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 layanan 2026: 2 layanan 2027: 2 layanan 2028: 2 layanan 2029: 2 layanan Total : 10 layanan	Non Kumulatif	Internal



		OK 2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 layanan 2026: 2 layanan 2027: 2 layanan 2028: 2 layanan 2029: 2 layanan Total : 10 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Kawasan Permukiman)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2026: 2 layanan 2027: 2 layanan 2028: 2 layanan 2029: 2 layanan Total: 8 layanan	Non Kumulatif	Internal



		OK 4	Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen Perumahan Perdesaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2026: 2 layanan 2027: 2 layanan 2028: 2 layanan 2029: 2 layanan Total: 8 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 5	Jumlah Layanan Umum(Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai P3KP Jawa IICapaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai P3KP Jawa IITarget output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2026: 2 layanan 2027: 2 layanan 2028: 2 layanan 2029: 2 layanan Total: 8 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 6	Jumlah Layanan Sarana Internal <i>(Sekretariat Jenderal)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan sarana internal oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan sarana internal di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 layanan 2026: 2 layanan 2027: 2 layanan 2028: 2 layanan 2029: 2 layanan Total : 10 layanan	Non Kumulatif	Internal



		OK 7	Jumlah Layanan Data dan Informasi <i>(Ditjen Kawasan Permukiman)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2026: 1 layanan 2027: 1 layanan 2028: 1 layanan 2029: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 8	Jumlah Layanan Data dan Informasi <i>(Ditjen Perumahan Perdesaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2026: 1 layanan 2027: 1 layanan 2028: 1 layanan 2029: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal



		OK 9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2026: 2 layanan 2027: 2 layanan 2028: 2 layanan 2029: 2 layanan Total: 8 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Kawasan Permukiman)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2026: 1 layanan 2027: 1 layanan 2028: 1 layanan 2029: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal



		OK 11	Jumlah Layanan BMN <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2026: 1 layanan 2027: 1 layanan 2028: 1 layanan 2029: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan reformasi kinerja oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan reformasi kinerja di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2026: 2 layanan 2027: 2 layanan 2028: 2 layanan 2029: 2 layanan Total: 8 layanan	Non Kumulatif	Internal



2.3 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Capaian Kinerja Program Pengembangan Perumahan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II di Triwulan I Tahun 2026 pada capaian progress fisik di Triwulan I ini secara keseluruhan sudah mulai berjalan, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

a. Sekretariat Jenderal

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Program Triwulan I Balai P3KP Jawa II (DIPA SEKJEN)

No.	Nama Paket	Output	Metode	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Progres (%)		Progres Fisik DIPA SEKJEN		
								Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar
1	Layanan Umum BP3KP Jawa II	1 Layanan	Swakelola	45,797,000	35,918,555	1/2/2025	12/31/2025	78.43	82.59	26.1	26.1	69.90
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II	1 Layanan	Swakelola	419,931,000	59,307,370	1/2/2025	12/31/2025	14.12	18.21	3.02	7.75	12.20
3	Langganan Daya dan Jasa	1 Dokumen	Swakelola	450,000,000	95,245,562	1/2/2025	12/31/2025	21.17	20.65	3.02	7.75	12.20
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Dokumen	Swakelola	509,001,000	24,495,500	1/2/2025	12/31/2025	4.81	12.20	3.02	7.75	12.20
5	Honor Pengelola Keuangan	1 Laporan	Swakelola	661,845,000	201,704,000	1/2/2025	12/31/2025	30.48	26.38	3.02	7.75	12.20
6	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BP3KP Jawa II dan Satker Jawa Barat	1 Laporan	Swakelola	52,000,000	10,619,100	1/2/2025	12/31/2025	20.42	1.40	1.00	1.20	1.40
7	Pengadaan Perangkat Pengolah Data BP3KP Jawa II dan Satker Jawa Barat	1 Dokumen	Swakelola	123,335,000	33,059,050	1/2/2025	12/31/2025	26.80	1.40	1.00	1.20	1.40
TOTAL				2,261,909,000	460,349,137			20.35	19.73	3.33	7.61	12.53



b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Program Triwulan I Balai P3KP Jawa II (DIPA DJKP)

No.	Nama Paket	Output	Metode	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Progres (%)		Progres Fisik DJKP Per Bulan		
								Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II	1 Dokumen	Swakelola	23,121,000	658,000	1/2/2025	12/31/2025	2.85	4.95	2.1	4.95	4.95
2	Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II	1 Dokumen	Swakelola	58,958,000	30,409,422	1/2/2025	12/31/2025	51.58	47.99	6.3	26.1	28.6
3	Pelaksanaan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman Balai P3KP Jawa II	1 Rekomendasi	Swakelola	52,319,000	13,954,271	1/2/2025	12/31/2025	26.67	9.18	2.1	9.18	9.18
4	Layanan Umum Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada BP3KP Jawa II	1 Layanan	Swakelola	14,635,000	1,016,000	1/2/2025	12/31/2025	6.94	10.94	2.1	9.04	9.04
5	Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi BP3KP Jawa II	1 Layanan	Swakelola	2,617,000	860,000	1/2/2025	12/31/2025	32.86	2.1	2.1	2.1	2.1
6	Penatausahaan BMN Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman di BP3KP Jawa II	1 Layanan	Swakelola	14,624,000	5,685,377	1/2/2025	12/31/2025	38.88	36.6	36.6	36.6	36.6
TOTAL				166,274,000	52,583,070			31.62	24.81	6.62	16.88	17.77

c. Direktorat Jenderal Perdesaan

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Program Triwulan I Balai P3KP Jawa II (DIPA Perdesaan)

No.	Nama Paket	Output	Metode	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Progres (%)		Progres Fisik Perdesaan Per Bulan		
								Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar
1	Penyusunan Perencanaan Teknis Perumahan Perdesaan di BP3KP Jawa II	1 Rekomendasi	Swakelola	13,239,000	3,921,000	1/2/2025	12/31/2025	29.6	16.9	1	1.5	16.9
2	Penyusunan Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan di BP3KP Jawa II	1 Rekomendasi	Swakelola	71,150,000	31,282,685	1/2/2025	12/31/2025	44	28.1	1	9.29	28.1
3	Penyusunan Perencanaan Kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi	Swakelola	58,749,000	23,399,832	1/2/2025	12/31/2025	39.8	21.12	1	13.7	13.7



4	Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan di BP3KP Jawa II	1 Dokumen	Swakelola	21,518,000	0	1/2/2025	12/31/2025	0	1.5	1	1.5	1.5
5	Fasilitasi Pengalihan Aset Pembangunan Perumahan Perdesaan BP3KP Jawa II	1 Laporan	Swakelola	11,749,000	0	1/2/2025	12/31/2025	0	1.5	1	1.5	1.5
6	Layanan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1 Layanan	Swakelola	28,639,000	0	1/2/2025	12/31/2025	0	1.5	1	1.5	1.5
7	Pengelolaan Data dan Informasi Serta Publikasi	1 Layanan	Swakelola	13,639,000	0	1/2/2025	12/31/2025	0	1.5	1	1.5	1.5
TOTAL				218,683,000	58,603,517			27	16.4	1.00	7.31	14.36

d. Direktorat Jenderal Perkotaan

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Program Triwulan I Balai P3KP Jawa II (DIPA Perkotaan)

No.	Nama Paket	Output	Metode	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Progres (%)		Progres Fisik Perkotaan Per Bulan		
								Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar
1	Perencanaan dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Balai P3KP	1 Rekomendasi	Swakelola	58,919,000	7,445,608	1/2/2025	12/31/2025	12.64	9.83	1.5	6.39	6.39
2	Fasilitasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi	Swakelola	35,812,000	8,295,000	1/2/2025	12/31/2025	23.16	23.23	5	16.5	16.5
3	Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi	Swakelola	45,381,000	10,086,900	1/2/2025	12/31/2025	22.23	19.7	1.5	12.5	19.7
4	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi	Swakelola	53,733,000	11,444,500	1/2/2025	12/31/2025	21.3	18.15	3.9	3.9	6.43
5	Fasilitasi dan Pemantauan Penyaluran Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi	Swakelola	49,898,000	10,175,400	1/2/2025	12/31/2025	20.39	5.65	1.5	2.96	2.96
6	Pengendalian Program Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Balai P3KP	1 Laporan	Swakelola	32,459,000	3,681,500	1/2/2025	12/31/2025	11.34	8.97	1.5	6.41	7.51



7	Layanan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Balai P3KP	1 Layanan	Swakelola	12,523,000	0	1/2/2025	12/31/2025	0	1.5	1.5	1.5	1.5
8	Rencana Kebutuhan dan Pengelolaan BMN Perumahan Perkotaan Balai P3KP Jawa II	1 Layanan	Swakelola	14,986,000	2,748,520	1/2/2025	12/31/2025	18.34	19.8	1.5	19.8	19.8
9	Publikasi Data dan Informasi Publik bidang Perumahan Perkotaan di Balai P3KP	1 Layanan	Swakelola	15,412,000	376,000	1/2/2025	12/31/2025	2.44	1.5	1.5	1.5	1.5
TOTAL				319,123,000	54,253,428			17	13.1	2.30	7.64	9.20

e. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Program Triwulan I Balai P3KP Jawa II (DIPA TKPR)

No.	Nama Paket	Output	Metode	Pagu RKAAL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Progres (%)		Progres Fisik TKPR Per Bulan		
								Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar
1	Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP	1 Rekomendasi	Swakelola	20,307,000	10,925,000	1/2/2025	12/31/2025	53.8		2.75	27.6	29.3
2	Penerapan Manajemen Risiko Balai P3KP	1 Rekomendasi	Swakelola	48,156,000	782,500	1/2/2025	12/31/2025	1.62		3.49	3.64	3.64
3	Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Balai P3KP	1 Rekomendasi	Swakelola	16,903,000	0	1/2/2025	12/31/2025	0		3.01	3.06	3.06
4	Pemantauan dan Pendampingan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1 Laporan	Swakelola	9,318,000	3,010,000	1/2/2025	12/31/2025	32.3		2.75	35.1	35.1
TOTAL				94,684,000	14,717,500			15.5		3.17	11.77	12.14



2.4 Permasalahan / Faktor Keberhasilan

Pada Triwulan I ini kegiatan BP3KP Jawa II sudah mulai berjalan diantaranya Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Jawa Barat, pembahasan dan reviu terhadap konsep Surat Edaran (SE) dan Petunjuk Teknis (Juknis) penyediaan, penatausahaan, dan pengelolaan komponen pracetak, penerapan Zona Integritas, dan juga Penyusunan Profil Risiko serta Pemantauan Risiko pada penerapan Manajemen Risiko BP3KP Jawa II.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah masih terjadinya perubahan pada dokumen rencana aksi dan dokumen perjanjian kinerja yang mengacu pada dokumen rencana aksi Kementerian maupun Unit Organisasi sehingga perlu banyak penyesuaian kembali sesuai dengan dokumen Rencana Aksi dan Dokumen Perjanjian Kinerja yang akan disusun oleh Balai P3KP Jawa II.

Pada setiap pelaksanaan pekerjaan akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi dan merupakan bagian dari sebuah dinamika dalam pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian tantangan dan permasalahan harus ditindaklanjuti dan diselesaikan sehingga tidak berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan.



BAB III KESIMPULAN

3.1 Rencana dan Tindak Lanjut

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I difokuskan pada penguatan fungsi fasilitasi, pendampingan, koordinasi, verifikasi teknis, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Kegiatan-kegiatan tersebut telah mendukung tercapainya indikator kinerja program di seluruh Direktorat Jenderal yang menjadi lingkup tugas BP3KP Jawa II, baik pada aspek dukungan manajemen, perencanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun penyusunan rekomendasi kebijakan teknis.

Dari sisi kinerja keuangan, realisasi anggaran hingga Triwulan I menunjukkan progres yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan nonfisik dan fasilitasi teknis. Sebagian besar anggaran direncanakan terealisasi pada Triwulan I seiring dengan selesainya tahapan persiapan, verifikasi, dan pendampingan teknis, terutama pada kegiatan program bantuan dan pembangunan fisik.

3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

Berdasarkan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan BP3KP Jawa II pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Secara keseluruhan, capaian kinerja BP3KP Jawa II pada Triwulan I Tahun 2026 sesuai dengan rencana kerja yang sudah di susun untuk mencapai target kinerja tahunan, dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Mulya Permana**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choeroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

Pihak Kedua

Didyk Choeroel
NIP. 197104161992011001

Pihak Pertama

Mochamad Mulya Permana
NIP. 197109201998031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II	1 Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan
		2 Jumlah Layanan Umum	2 Layanan
		3 Jumlah Layanan Sarana Internal	2 Unit

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat

PAGU APBN

Rp	2.261.909.000,00
Rp	557.018.000,00
Rp	2.818.927.000,00

SEKRETARIS JENDERAL

DIDYK CHOIROEL

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II

MOCHAMAD MULYA PERMANA





KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Mulya Permana**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**

Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Maret 2026

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Sri Haryati

NIP. 197107071997032004

Mochamad Mulya Permana

NIP. 197109201998031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
2.	Meningkatnya Akses Penyediaan Lahan, Perumahan dan Penghunan Perumahan Perkotaan	2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan
3.	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyediaan Lahan, Perizinan dan Penghunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
4.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
5.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
6.	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Unit Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	56 Unit
7.	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
Program Dukungan Manajemen			
1.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	1 Layanan
		2. Jumlah Layanan Umum	2 Layanan
		3. Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan

KEGIATAN

1. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat

ANGGARAN

Rp 397.637.000,00
Rp 35.033.424.000,00 +
Rp 35.431.061.000,00

Jakarta, 30 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN JAWA II

SRI HARYATI

MOCHAMAD MULYA PERMANA



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Mulya Permana**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**

Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 07 April 2026

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Imran
NIP. 197310261993021001

Mochamad Mulya Permana
NIP. 197109201998031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, komitmen, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	1. Jumlah Rekomendasi Kegiatan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
		3. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan
2	Meningkatnya akses penyajian lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan	1. Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyajian Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
		2. Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
3	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan	1. Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
4	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1. Jumlah Rekomendasi Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
5	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1. Jumlah Rekomendasi Kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2. Jumlah unit Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	320 unit
6	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1. Jumlah Layanan Umum	2 Layanan
7	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1. Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan

KEGIATAN

1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat

ANGGARAN

Rp 491.713.000,00
Rp 11.287.670.000,00 +
Rp 11.779.383.000,00

Jakarta, 07 April 2026

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN JAWA II

IMRAN

MOCHAMAD MULYA PERMANA





KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Mulya Permana**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Maret 2026

Pihak Kedua

Fitrah Nur
NIP. 196704191994031003

Pihak Pertama



Mochamad Mulya Permana
NIP. 197109201998031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 2 Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 dokumen 1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 dokumen
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1 Jumlah Layanan BMN 2 Jumlah Layanan Umum 3 Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan 2 Layanan 1 Layanan

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II	Rp 273.808.000,00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat	Rp 21.656.000,00
	Rp 295.464.000,00

Jakarta, 31 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II

MOCHAMAD MULYA PERMANA



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Mulya Permana**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**

Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Januari 2026

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Mochamad Mulya Permana
NIP. 197109201998031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	3 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN

1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN

Rp 148,605,000.00

Jakarta, 28 Januari 2026

**DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN
RISIKO**

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN JAWA II**

AZIS ANDRIANSYAH

MOCHAMAD MULYA PERMANA

